



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang standar kualitas hasil kerja, penilaian kualitas hasil kerja, penilaian kinerja, dan penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun

2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 598);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Analis Pemantauan adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
7. Hasil Kerja Analis Pemantauan adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar Kualitas Hasil Kerja Analis Pemantauan yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional Analis Pemantauan untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.

9. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Analis Pemantauan.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Analis Pemantauan yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pemantauan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Analis Pemantauan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pemantauan dalam bentuk angka kredit Analis Pemantauan.
14. Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi Analis Pemantauan di unit kerjanya.

15. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatur mengenai:

- a. SKHK;
- b. penilaian Kualitas Hasil Kerja.
- c. penilaian kinerja; dan
- d. penilaian Angka Kredit.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 3

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. jenis SKHK; dan
- b. komponen SKHK.

Pasal 4

(1) Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. SKHK Analis Pemantauan ahli pertama;
- b. SKHK Analis Pemantauan ahli muda;
- c. SKHK Analis Pemantauan ahli madya; dan
- d. SKHK Analis Pemantauan ahli utama

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 5

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. kegiatan tugas jabatan; dan
- b. satuan hasil kerja.

Pasal 6

- (1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur kegiatan, sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (2) Unsur kegiatan, sub-unsur kegiatan dan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

Pasal 7

Satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

BAB III

PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 8

- (1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Analis Pemantauan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. Penilaian kinerja Analis Pemantauan; dan
 - b. Penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (2) Penilaian kinerja Analis Pemantauan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian kinerja Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 10

Penilaian kinerja meliputi:

- a. SKP Analis Pemantauan dengan bobot sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen); dan
- b. perilaku kerja dengan bobot sebesar 30% (Tiga Puluh Persen).

Bagian Kedua

SKP

Pasal 11

- (1) SKP Analis Pemantauan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan atasan langsung sebagai pejabat penilai.
- (3) SKP Analis Pemantauan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Pemantauan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 12

- (1) SKP terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Jumlah kegiatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan mendapat nilai 1 (satu);
 - b. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan mendapat nilai 2 (dua); dan
 - c. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih mendapat nilai 3 (tiga).
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Analis Pemantauan ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (6) Analis Pemantauan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (7) Pejabat Penilai selaku atasan langsung berwenang menetapkan hasil Penilaian SKP Analis Pemantauan di unit kerjanya.
- (8) Penetapan Penilaian SKP oleh PyB dilakukan paling lama akhir bulan Januari untuk periode kenaikan pangkat atau jabatan pada bulan April dan akhir bulan Juli untuk periode kenaikan pangkat atau jabatan pada bulan Oktober.

- (9) Penilaian SKP didasarkan atas dokumentasi hasil kerja yang diusulkan oleh Analis Pemantauan.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 13

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit dan ditetapkan oleh PyB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penilaian angka kredit diberikan dengan mengacu kepada:
 - a. kriteria penilaian Angka Kredit;
 - b. bukti fisik dan/atau bukti elektronik; dan
 - c. tolok ukur.
- (2) Analis Pemantauan wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan penilaian Angka Kredit sebagai bukti fisik dan/atau bukti elektronik yang akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian Angka Kredit dalam jenis dan komponen SKHK setiap jenjang yang mengacu pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (3) Kriteria Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan terdiri atas:
 - a. unsur pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - b. unsur penanganan perkara pengujian undang-undang;

- c. unsur analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
 - d. unsur penyusunan database peraturan perundang-undangan;
 - e. unsur pengembangan profesi Analis Pemantauan;
 - f. unsur penunjang tugas Analis Pemantauan.
- (4) Bukti fisik dan/atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kelengkapan dokumen yang dihasilkan dari setiap kegiatan tugas jabatan Analis Pemantauan.
- (5) Bukti fisik dan/atau bukti elektronik sesuai dengan kriteria penilaian Angka Kredit meliputi:
- a. buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - b. konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah untuk kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang;
 - c. buku analisis dan evaluasi undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi/putusan Mahkamah Agung untuk kegiatan analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
 - d. *database* peraturan perundang-undangan untuk kegiatan penyusunan *database* peraturan perundang-undangan;

- e. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan yang telah dilaksanakan sebagai penunjang kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
- (6) Bukti fisik dan/atau bukti elektronik yang dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai f merupakan alat bukti yang sudah mencakup seluruh sub unsur dan butir kegiatan masing-masing unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sesuai dengan jenjangnya.
 - (7) Penilaian yang diberikan berdasarkan bukti fisik dan/atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) sudah merupakan satu kesatuan untuk semua sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sesuai dengan jenjangnya.
 - (8) Penyampaian bukti fisik dan/atau bukti elektronik kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
 - (9) Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan acuan pemenuhan kuantitas dan kualitas hasil kerja dengan waktu dan target yang telah ditentukan dalam SKP Analis Pemantauan selama jangka waktu penilaian yang akan dilakukan.

Pasal 16

- (1) Penilaian Angka Kredit hasil kerja Analis Pemantauan dihitung dengan mengacu kepada kesesuaian kegiatan tugas jabatan dan satuan

hasil kerja dengan bukti fisik dan/atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f.

- (2) Kesesuaian bukti fisik dan/atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merujuk pada Lampiran VII merupakan dasar pemberian penilaian penuh terhadap Angka Kredit Analis Pemantauan yang dinilai sesuai dengan jenjangnya.

Bagian Ketiga

Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Untuk menilai capaian angka mutu hasil kerja Analis Pemantauan sesuai dengan unsur dan sub unsur kegiatan maka dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Analis Pemantauan.
- (2) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai Angka Kredit meminta bukti fisik dan/atau bukti elektronik kepada Analis Pemantauan yang akan dinilai.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit wajib mengembalikan dokumen apabila terdapat bukti fisik dan/atau bukti elektronik yang kurang atau tidak lengkap untuk dilengkapi dan/atau disesuaikan dengan penilaian bukti fisik dan/atau bukti elektronik sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII.

Bagian Keempat Hasil Penilaian Angka Kredit

Pasal 18

Hasil penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 19

Kategori Penilaian Angka Kredit unsur Pengembangan Profesi Analis Pemantauan dan unsur Penunjang Tugas Analis Pemantauan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 20

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pemantauan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, maka Analis Pemantauan dapat melaksanakan kegiatan di semua jenjang jabatannya berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 21

Hasil kerja pelaksanaan Pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan selama masa Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dapat

diajukan untuk pengajuan Angka Kredit tahunan dan dapat digunakan dalam pemenuhan Hasil Kerja Minimal kenaikan jenjang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Analis Pemantauan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PEMANTAUAN AHLI PERTAMA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
1.	Pemantauan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan	A.	Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	1	Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan:			
				a.	Menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan.	Laporan telaahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan	0.62	Ahli Pertama
				b.	Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.	Laporan penelusuran peraturan pelaksanaan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	0.66	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
			2	Menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	Laporan analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	0.49	Ahli Pertama	
			3	Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai:				
				a.	Penyaji.	Bahan paparan hasil analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	0.40	Ahli Pertama
				b.	Peserta diskusi.	Catatan Diskusi	0.30	Ahli Pertama
		B.	Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan	4	Menginventarisasi data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari:			
				a.	Hasil diskusi	Laporan hasil diskusi	0.21	Ahli Pertama
				b.	Hasil studi pustaka	Laporan hasil studi pustaka	0.21	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4		5	7	8	
					c.	Hasil seminar	Laporan hasil seminar	0.21	Ahli Pertama
					d.	Hasil survei	Laporan hasil survei	0.23	Ahli Pertama
					e.	Hasil wawancara	Laporan hasil wawancara	0.25	Ahli Pertama
				5	Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:				
				a.	Infografis	Infografis	0.26	Ahli Pertama	
2.	Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	A.	Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	6	Menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang.	Laporan hasil telaahan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.26	Ahli Pertama	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			7	Menginventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Laporan hasil inventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	0.30	Ahli Pertama
			8	Menginventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan.	Laporan hasil inventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan.	0.39	Ahli Pertama
			9	Menginventarisasi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang	Laporan hasil inventarisasi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam	0.39	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
				yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	permohonan perkara pengujian undang-undang.		
			10	Menginventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	Laporan hasil inventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.45	Ahli Pertama
			11	Menginventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar.	Laporan hasil inventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar.	0.34	Ahli Pertama
		B.	12	Menyusun <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan:			
				a. menganalisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	Laporan hasil analisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	0.31	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			b.	menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji.	Laporan hasil telaahan risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji.	0.56	Ahli Pertama
			13	Mengikuti pemaparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai:			
			a.	Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.15	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4		5	7	8	
				14	Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan:				
					a.	Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	Catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	0.13	Ahli Pertama
					b.	Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	Laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	0.22	Ahli Pertama
				15	Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	Resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.43	Ahli Pertama	
				16	Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.	Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.42	Ahli Pertama	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
3.	Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	A. Penyusunan <i>Draft</i> Analisis Undang-Undang/Pera turan perundang-undangan berdasarkan Uji Materi	17	Mengikuti pemaparam <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai:			
			a.	Peserta	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	0.14	Ahli Pertama
			18	Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagai:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			a.	Peserta	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung	0.21	Ahli Pertama
		B.	19	Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan:			
			a.	Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.51	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			b. Bidang Urusan Komisi	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan bidang urusan komisi.	0.51	Ahli Pertama
			20 Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan:			
			a. Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Agung	Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, berdasarkan tahun penetapan putusan Mahkamah Agung.	0.51	Ahli Pertama
			b. Bidang Urusan Komisi	Dokumen Dokumen Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung,	0.51	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4			5	7	8
						berdasarkan bidang urusan Komisi.		
			21	Menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.		Laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	0.32	Ahli Pertama
			22	Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.		Laporan hasil telaahan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	0.32	Ahli Pertama
4.	Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan	A.	23	Mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan, berdasarkan:				
				a.	Data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan.	Data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan.	0.14	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
				b.	Pemutakhiran data status peraturan perundang-undangan (mengubah/diubah, mencabut/dicabut).	Data status peraturan perundang-undangan.	0.12	Ahli Pertama
				c.	Data tanggal pengesahan, Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.	Data tanggal pengesahan, Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.	0.12	Ahli Pertama
				d.	Penelusuran hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.	Data hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.	0.19	Ahli Pertama
			24	Menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun.	Daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun.	0.12	Ahli Pertama	
			25	Mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun.	Laporan jumlah peraturan perundang-undangan per tahun.	0.12	Ahli Pertama	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
		B.	Penyusunan data undang-undang/Pera turan Perundang-Undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi/MA	26	Melakukan kegiatan <i>input</i> data ke dalam sistem <i>database</i> atas pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung.	Berita Acara <i>Input</i> Data pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung.	0.27	Ahli Pertama
				27	Melakukan kegiatan <i>input</i> data perkara ke dalam <i>database</i> perkara.	Berita Acara <i>Input</i> Data perkara ke dalam <i>database</i> perkara.	0.12	Ahli Pertama
				28	Melakukan kegiatan <i>input</i> data putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung ke dalam <i>database</i> Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.	Berita Acara <i>Input</i> Data putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung ke dalam <i>database</i> Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.	0.12	Ahli Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
				29	Melakukan kegiatan <i>input</i> data kedalam <i>database</i> undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Agung.	Berita Acara <i>Input</i> Data undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Agung.	0.12	Ahli Pertama
5	Pengembangan Profesi Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif		Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:		
			a. dalam buku/ majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang
			b. dalam buku/ majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang
			c. dalam buku/ majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei / evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4			5	7	8	
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang	
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang	
			3.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan					
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang	
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang	
			4.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:					

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			a.	dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b.	dalam bentuk makalah	Naskah	3.5	Semua Jenjang
			5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
			6.	Membuat artikel di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan	1.	Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3.5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Buku	3	Semua Jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi :		
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			2. seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
		Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	3.	pelatihan teknis/ magang di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan dan memperoleh Sertifikat				
				a.	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
				b.	lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
				c.	lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
				d.	lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
				e.	lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
				f.	lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
				g.	lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			4.	pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat				

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4.5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1.5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
6	Penunjang Tugas Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	A.	Pengajar/ Pelatih/ Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif		Sertifikat/ Laporan	0.4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi		Laporan	0.04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1.	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:			
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2.	Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c.	Tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya :				
			1.	Doktor (S-3)	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			2.	Magister (S-2)	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			3.	Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV)	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	7	8
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.04	Semua Jenjang

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PEMANTAUAN AHLI MUDA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
1.	Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	A.	Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	1	Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan:			
				a.	Menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain.	Laporan telaahan pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain	1.31	Ahli Muda
				b.	Menelaah hasil putusan Mahkamah	Laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait	0.63	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
				Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.	dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.		
			2	Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai:			
			a.	Peserta diskusi.	Catatan Diskusi	0.60	Ahli Muda
		B. Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-	3	Menyusun Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	0.60	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4		5	7	8	
			undangan	4	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data.	Laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data.	0.61	Ahli Muda	
				5	Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:				
					a.	Buku	Buku	0.64	Ahli Muda
					b.	Infografis	Infografis	0.51	Ahli Muda
2.	Penanganan Perkara	A.	Persiapan dan Analisis	6	Menyusun resume hasil pengumpulan data.	Resume hasil pengumpulan data.	0.57	Ahli Muda	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
	Pengujian undang-undang	Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	7	Menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan/atau keterangan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan.	Laporan Hasil Analisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan/atau keterangan Dewan Perwakilan Rakyat /Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan.	1.06	Ahli Muda
			8	Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	Laporan Hasil Telaahan teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	1.01	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		B. Penyusunan dan Perbaikan <i>Draft</i> Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	9 Menyusun <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan:			
			a. menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	Laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.66	Ahli Muda
			b. menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji.	Laporan hasil telaahan risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji.	1.11	Ahli Muda
			10 Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	Laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	0.86	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			11 Menyusun perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	<i>Draft</i> perbaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.91	Ahli Muda
			12 Mengikuti pemaparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai:			
			a. Penyaji.	Bahan Paparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan	0.39	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
				permohonan perkara pengujian undang-undang		
			b. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.30	Ahli Muda
			13 Menyusun perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi.	<i>Draft</i> perbaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi.	0.32	Ahli Muda
			14 Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan:			
			a. Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	Catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	0.25	Ahli Muda
			b. Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	Laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	0.43	Ahli Muda
			15 Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	Resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.87	Ahli Muda
			16 Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.	Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.84	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
3.	Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	A.	Penyusunan <i>draft</i> Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	17	Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.	Laporan Hasil Telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.	0.51	Ahli Muda
				18	Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung.	Laporan Hasil Telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung.	0.47	Ahli Muda
				19	Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi.	Laporan Hasil Telaahan akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi.	1.26	Ahli Muda
				20	Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung.	Laporan Hasil Telaahan akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung.	0.78	Ahli Muda
				21	Menyusun <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	<i>Draft</i> Analisis dan Evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	1.31	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			22	Menyusun <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	<i>Draft</i> Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0.95	Ahli Muda
			23	Menyusun konsep paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Konsep Paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.37	Ahli Muda
			24	Menyusun konsep paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	Konsep Paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0.30	Ahli Muda
			25	Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			a. Penyaji.	Bahan Paparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.44	Ahli Muda
			b. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.28	Ahli Muda
			26 Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			a. Penyaji.	Bahan Paparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	1.12	Ahli Muda
			b. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0.42	Ahli Muda
			27 Merevisi <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	<i>Draft</i> hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	0.64	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			28 Merevisi <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	<i>Draft</i> hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	0.63	Ahli Muda
		B. Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	29 Menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	Laporan hasil telaahan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	0.63	Ahli Muda
			30 Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	Laporan hasil telaahan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	0.63	Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
4	Pengembangan Profesi Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif		Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Semua Jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
		Peraturan Perundang-undangan Legislatif	a.	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang
			b.	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang
			c.	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua Jenjang
			2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei / evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3.5	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan- Bahan Lain di Bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang- Undangan Legislatif	1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Buku	3	Semua Jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:		
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			2. seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	3. pelatihan teknis/ magang di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4.5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1.5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	7	8
5	Penunjang Tugas Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	A.	Pengajar/ Pelatih/ Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Sertifikat/ Laporan	0.4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1.	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :		
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4			5	7	8
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
				c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2.	Penghargaan atas prestasi kerjanya				
				a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
				b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
				c.	Tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	Perolehan ijazah/ gelar keserjanaan lainnya					
			Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:					
			1.	Doktor (S-3)		Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			2.	Magister (S-2)		Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			3. Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV)	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.04	Semua Jenjang

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PEMANTAUAN AHLI MADYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
1.	Pemantauan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan	A.	Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	1	Menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.	Laporan rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.	2.17	Ahli Madya
				2	Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan:			
				a.	Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang	Laporan telaahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi	0.94	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
				terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.	yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.		
			3	Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai:			
			a.	Peserta diskusi.	Catatan Diskusi	0.89	Ahli Madya
			4	Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	Rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	1.58	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
		B.	Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan	5	Menyusun Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	0.90	Ahli Madya
				6	Menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan	1.94	Ahli Madya
				7	Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data.	Laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data.	0.92	Ahli Madya
				8	Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	1.75	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
				9	Menyusun <i>executive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	<i>Executive Summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	1.75	Ahli Madya
				10	Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Kajian Singkat hasil kajian evaluasi peman-tauan peraturan perundang-undangan.	1.78	Ahli Madya
				11	Menyusun bahan publi-kasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:			
				a.	Infografis	Infografis	0.77	Ahli Madya
2.	Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	A.	Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian	12	Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian	Laporan Hasil Telaahan teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi	1.51	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		undang-undang	undang-undang di Mahkamah Konstitusi.	permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.		
		B. Penyusunan dan Perbaikan <i>Draft</i> Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	13 Menyusun <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan:			
			a. menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	Laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.99	Ahli Madya
			14 Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	Laporan hasil telaahan data dan informasi untuk penyusunan perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	1.29	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			15 Menyusun perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	<i>Draft</i> perbaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	1.36	Ahli Madya
			16 Mengikuti pemaparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai:			
			a. Penyaji.	Bahan Paparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah	0.58	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
				berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.		
			b. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.46	Ahli Madya
			17 Menyusun perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi.	<i>Draft</i> perbaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi.	0.48	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			18 Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan:			
			a. Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	Catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	0.38	Ahli Madya
			b. Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	Laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	0.65	Ahli Madya
			19 Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	Resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	1.30	Ahli Madya
			20 Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.	Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi.	1.26	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
3.	Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	A. Penyusunan <i>draft</i> Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	21	Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.	Laporan Hasil Telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi.	0.76	Ahli Madya
			22	Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung.	Laporan Hasil Telaahan putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung.	0.70	Ahli Madya
			23	Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi.	Laporan Hasil Telaahan akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi.	1.89	Ahli Madya
			24	Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung.	Laporan Hasil Telaahan akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung.	1.18	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			25	Menyusun <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	<i>Draft</i> Analisis dan Evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	1.97	Ahli Madya
			26	Menyusun <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	<i>Draft</i> Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	1.42	Ahli Madya
			27	Menyusun konsep paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Konsep Paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.56	Ahli Madya
			28	Menyusun konsep paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	Konsep Paparan hasil <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0.44	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			29 Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai:			
			a. Penyaji.	Bahan Paparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.67	Ahli Madya
			b. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.42	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			30 Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai:			
			a. Penyaji.	Bahan Paparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	1.69	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4			5	7	8
				b.	Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0.63	Ahli Madya
			31	Merevisi <i>draft</i> analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.		<i>Draft</i> hasil revisi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.	0.96	Ahli Madya
			32	Merevisi <i>draft</i> analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang		<i>Draft</i> hasil revisi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah	0.94	Ahli Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			ada pada saat presentasi.	Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi.		
4	Pengembangan Profesi Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:		
			a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang
			b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang
			c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei / evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3.5	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			6. Membuat artikel di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Buku	3	Semua Jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan			
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi :			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			2. seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	3. pelatihan teknis/ magang di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4.5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1.5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	7	8
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
6	Penunjang Tugas Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	A.	Pengajar/ Pelatih/ Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Mengajar/ melatih/ membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif		Sertifikat/ Laporan	0.4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi		Laporan	0.04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1.	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :			
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4			5	7	8
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
				c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2.	Penghargaan atas prestasi kerjanya				
				a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
				b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
				c.	Tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	Perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya			Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:		
			1.	Doktor (S-3)		Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			2.	Magister (S-2)		Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			3. Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV)	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.04	Semua Jenjang

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PEMANTAUAN AHLI UTAMA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
1.	Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	A.	Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	1	Menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.	Laporan rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.	2.89	Ahli Utama
				2	Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai:			
					a.	Peserta diskusi.	Catatan Diskusi	1.19

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
				3	Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	Rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau.	2.11	Ahli Utama
		B.	Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan	4	Mereview laporan hasil analisis evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Laporan hasil review laporan hasil analisis evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2.21	Ahli Utama
				5	Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2.33	Ahli Utama
				6	Menyusun <i>excecutive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	<i>Executive Summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2.33	Ahli Utama
				7	Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	Kajian Singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	2.37	Ahli Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
				8	Menyusun <i>policy brief</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	<i>Policy brief</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan.	4.19	Ahli Utama
				9	Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:			
				a.	Infografisa	Infografis	1.03	Ahli Utama
2.	Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	A.	Penyusunan dan Perbaikan <i>Draft</i> Penanganan Perkara Pengujian undang-undang	10	Menyusun <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan:			
				a.	menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	Laporan hasil analisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang.	1.32	Ahli Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			11 Mengikuti pemaparan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai:			
			a. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang.	0.61	Ahli Utama
			12 Memvalidasi perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	Laporan Hasil Validasi perbaikan <i>Draft</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.	2.40	Ahli Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		5	7	8
			13	Menyusun <i>executive summary</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan pengujian undang-undang.	<i>Executive Summary</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan pengujian undang-undang.	2.08	Ahli Utama
			14	Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
				a.	Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	Catatan substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang.	0.50	Ahli Utama
				b.	Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	Laporan proses persidangan pengujian undang-undang.	0.87	Ahli Utama
				15	Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	Resume Putusan Mahkamah Konstitusi.	1.74	Ahli Utama
				16	Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi.	Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi.	1.69	Ahli Utama
3.	Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan	A.	Penyusunan <i>draft</i> Analisis undang-undang/peraturan perundang-	17	Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
	berdasarkan uji materi	undangan berdasarkan uji materi	a. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	0.57	Ahli Utama
			18 Mengikuti pemaparan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai:			
			a. Peserta.	Laporan Hasil Telaahan <i>draft</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	0.84	Ahli Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
				19	Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Laporan Hasil Validasi analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	2.25	Ahli Utama
				20	Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	Laporan Hasil Validasi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	2.25	Ahli Utama
		B.	Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi	21	Menyusun anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	Buku anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi.	3.29	Ahli Utama
				22	Menyusun anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	Buku anotasi perubahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung.	3.32	Ahli Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			23 Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	<i>Policy brief</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	4.33	Ahli Utama
			24 Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	<i>Policy brief</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.	4.28	Ahli Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
4	Pengembangan Profesi Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Semua Jenjang
		B.	1. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
		Peraturan Perundang-undangan Legislatif		a.	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang
				b.	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang
				c.	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua Jenjang
			2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei / evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:				

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4		5	7	8	
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3.	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan				
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang	
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3.5	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		C.	Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:		
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	3.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		D.	Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Buku	3	Semua Jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:		
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			2. seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
		Perundang-Undangan Legislatif	3. pelatihan teknis/ magang di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			4. pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4.5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1.5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	7	8
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	7	8
5	Penunjang Tugas Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	A.	Pengajar/ Pelatih/ Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan		Sertifikat/ Laporan	0.4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi		Laporan	0.04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan	1.	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :			
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4		5	7	8	
					b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
					c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
				2.	Penghargaan atas prestasi kerjanya				
					a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
					b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
					c.	Tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	Perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:					
				1.	Doktor (S-3)	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang	
				2.	Pasca Sarjana (S-2)	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
			3. Sarjana (S-1) / Diploma IV (D-IV)	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.04	Semua Jenjang

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA NIKANDAR

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN LEGISLATIF

CAPAIAN ANGKA KREDIT

Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP

Sdri. Nur Azizah, S.H., M.H., NIP. 198612062018012001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda.

Target Angka Kredit bagi Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda setiap tahun ditetapkan paling sedikit adalah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Sdri. Nur Azizah, S.H., M.H, pada Tahun 2023 telah memenuhi target Angka Kredit 150%, sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit, dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 90 (sembilan puluh).

Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$90 \times 37,5 = 33,75$ Angka Kredit

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

**CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP**

Nomor ...

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda Yang Dinilai				
1.	NAMA	Nur Azizah, S.H., M.H.		
2.	NIP	198612062018012001		
3.	NOMOR SERI KARPEG			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
5.	JENIS KELAMIN			
6.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT			
7.	JABATAN/TMT			
8.	UNIT KERJA			
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT				
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT MINIMAL 25/MAKSIMAL 37,5 YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 3)
1	2	3	4	5
2023	37,5	90	37,5*	33,75
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh				33,75

*AK Maksimal diperoleh dari AK Minimal $25 \times 150\% = 37,5$

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF

**KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi Analis Pemantauan Peraturan Perundang- Undangan Legislatif	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang- Undangan Legislatif	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Ijazah/ Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			
			a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/ Buku	20	Semua Jenjang
			b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/ Buku	12.5	Semua Jenjang
			c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/ Buku/ Naskah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3.5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang pemantauan peraturan perundang- undangan legislatif yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1.5	Semua Jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan	1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangn Legislatif	Buku	3	Semua Jenjang
		E. Pengembangan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0.5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ laporan	4.5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ laporan	1.5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ laporan	0.5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ laporan	0.25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/ laporan	0.5	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.5	Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	A.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Sertifikat/ Laporan	0.4	Semua Jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/ Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/ Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat/ Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor	Ijazah/ Gelar	15	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		lainnya	b. Magister	Ijazah/ Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/ Gelar	5	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Laporan	0.04	Semua Jenjang

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

INDRAISKANDAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT ANALIS
PEMANTAUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

FORMULIR PENILAIAN BUKTI FISIK DAN/ATAU BUKTI ELEKTRONIK

A. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI MUDA YANG DINILAI		
1.	NAMA	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
2.	NIP	199301192018012002
3.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT	
4.	TANGGAL DIBUAT	
UNSUR KEGIATAN		
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
A. Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ...		
Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020):		
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan (AK 1,31) []		
2. Menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (AK 0,60) []		
3. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data (AK 0,61) []		
4. dst.		
B. Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ...		
Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020):		
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau dengan menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan (AK 1,31) []		
2. Menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (AK 0,60) []		
3. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data (AK 0,61) []		
4. dst.		

Waktu Pelaksanaan: 1 Tahun 3 Bulan		
Periode Waktu Penilaian: periode 1 Oktober 2021 s.d Februari 2023		
Jumlah hasil dari unsur kegiatan: ... buku		
Jumlah Angka Kredit: $1,31 + 0,60 + 0,61 = 2,52$		
Mengetahui Atasan Langsung,	Ketua Tim Penilai	Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Analisis Pemantauan Peraturan Perundang- Undangan Legislatif Muda yang dinilai
NIP.	NIP.	NIP.

B. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI MUDA YANG DINILAI		
1.	NAMA	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
2.	NIP	199301192018012002
3.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT	
4.	TANGGAL DIBUAT	
UNSUR KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG		
A. Perkara MK No.... (Belum Diputus) Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020): 1. Menyusun resume hasil pengumpulan data (AK 0,57) [] 2. Menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan atau Keterangan DPR/DPD terdahulu, Putusan MK terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan (AK 1,06) [] 3. Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di MK (AK 1,01) [] 4. dst. (tidak sampai dalam menyusun Info JR) B. Perkara MK No. ... (Telah Diputus) Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020): 1. Menyusun resume hasil pengumpulan data (AK 0,57) [] 2. Menganalisis keterkaitan antar pasa undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan atau Keterangan DPR/DPD terdahulu, Putusan MK terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan (AK 1,06) [] 3. Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di MK (AK 1,01) [] 4. dst. (sampai dalam menyusun Info JR)		
Waktu Pelaksanaan: 1 Tahun 3 Bulan		
Periode Waktu Penilaian: periode 1 Oktober 2021 s.d Februari 2023		
Jumlah hasil dari unsur kegiatan: ... Konsep		
Jumlah Angka Kredit: 0,57 + 1,06 + 1,01 = 2,64		
Mengetahui Atasan Langsung,	Ketua Tim Penilai	Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Muda yang dinilai
NIP.	NIP.	NIP.

C. ANALISIS UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UJI MATERI

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI MUDA YANG DINILAI		
1.	NAMA	Nur Azizah, S.H., M.H.
2.	NIP	19861206201802001
3.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT	
4.	TANGGAL DIBUAT	
UNSUR KEGIATAN		
ANALISIS UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UJI MATERI		
Analisis Evaluasi Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan Nomor ... Tentang ... Berdasarkan Putusan MK/MA		
Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020):		
1.	Menelaah Putusan yang mengabulkan dari Putusan MK (AK 0,51)	 []
2.	Menelaah akibat hukum undang-undang dari Putusan MK (AK 1,26)	 []
3.	Menyusun draft analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan MK (AK 1,31)	 []
4.	dst.	
Waktu Pelaksanaan: 1 Tahun 3 Bulan		
Periode Waktu Penilaian: periode 1 Oktober 2021 s.d Februari 2023		
Jumlah hasil dari unsur kegiatan: ... Buku		
Jumlah Angka Kredit: 0,51 + 1,26 + 1,31 = 3,08		
Mengetahui Atasan Langsung,	Ketua Tim Penilai	Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Muda yang dinilai
NIP.	NIP.	NIP.

D. PENYUSUNAN DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI PERTAMA YANG DINILAI		
1.	NAMA	Trisuharto Clinton, S.H.
2.	NIP	199303122019031001
3.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT	
4.	TANGGAL DIBUAT	
UNSUR KEGIATAN		
PENYUSUNAN DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
A. Penyusunan Data Peraturan Perundang-Undangan Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020): - Mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan, berdasarkan: data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan (AK 0, 14) [] - Menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun (AK 0, 12) [] - Mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun (AK 0,12) [] - dst. B. Penyusunan Data Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan MK/MA Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020): - Melakukan kegiatan input data ke dalam sistem <i>database</i> atas pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan MK/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan oleh MA (AK 0,27) [] - Melakukan kegiatan input data perkara ke dalam <i>database</i> perkara (AK 0,12) [] - Melakukan kegiatan input data putusan MK/MA ke dalam <i>database</i> Putusan MK/MA (AK 0,12) [] - dst.		
Waktu Pelaksanaan: 1 Tahun 3 Bulan		
Periode Waktu Penilaian: periode 1 Oktober 2021 s.d Februari 2023		
Jumlah hasil dari kegiatan:		
a. ... Laporan/Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Bidang Komisi b. ... Laporan/Dokumen data Perkara MK/MA		
Jumlah Angka Kredit: 0,14 + 0,12 + 0,12 = 0,38		
Mengetahui Atasan Langsung,	Ketua Tim Penilai	Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Pertama yang dinilai
NIP.	NIP.	NIP.

E. PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI PERTAMA YANG DINILAI		
1.	NAMA	Trisuharto Clinton, S.H.
2.	NIP	199303122019031001
3.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT	
4.	TANGGAL DIBUAT	
UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020): 1. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survey/evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang dipublikasikan dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek (AK 20)[] 2. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survey/ evaluasi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku (AK 8) [] 3. dst.		
Waktu Pelaksanaan: 1 Tahun 3 Bulan		
Periode Waktu Penilaian: periode 1 Oktober 2021 s.d Februari 2023		
Jumlah hasil dari kegiatan: ... (Buku/Jurnal/Bentuk lain yang diatur dalam Lampiran Permenpan No. 42 Tahun 2020)		
Jumlah Angka Kredit: 20+8 = 28		
Mengetahui Atasan Langsung,	Ketua Tim Penilai	Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Analisis Pemantauan Peraturan Perundang- Undangan Legislatif Pertama yang dinilai
NIP.	NIP.	NIP.

F. PENUNJANG TUGAS ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI PERTAMA YANG DINILAI		
1.	NAMA	Trisuharto Clinton, S.H.
2.	NIP	199303122019031001
3.	PANGKAT GOLONGAN RUANG/TMT	
4.	TANGGAL DIBUAT	
UNSUR KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF		
Nama Butir Kegiatan (Berdasarkan Permenpan 42/2020):		
1.	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	(AK 0,4)
..... []		
2.	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	(AK 0.04)
..... []		
3. dst.		
Waktu Pelaksanaan: 1 Tahun 3 Bulan		
Periode Waktu Penilaian: periode 1 Oktober 2021 s.d Februari 2023		
Jumlah hasil dari kegiatan: ... (Sertifikat/Laporan/Bentuk lain yang diatur dalam Lampiran Permenpan No. 42 Tahun 2020)		
Angka Kredit: $0,4 + 0,04 = 0,44$		
Mengetahui Atasan Langsung,	Ketua Tim Penilai	Jakarta, (tanggal, bulan, tahun) Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Pertama yang dinilai
NIP.	NIP.	NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

INDRA ISKANDAR